

Bab 4

KESIMPULAN

Kebijakan EPA Jepang muncul dalam konteks yang saling terhubung dengan strategi konvensional perdagangan Jepang dan peran regionalnya di kawasan. Ada empat konteks yang selalu dikemukakan oleh para akademisi ketika membahas kebijakan FTA/EPA Jepang: (1) posisi Jepang dalam hal liberalisasi perdagangan multilateral dan proliferasi PTA; (2) peristiwa Krisis Keuangan Asia 1997 yang meningkatkan kesadaran akan interdependensi yang kuat diantara negara-negara di kawasan dan perkembangan regionalisme di Asia Timur dan Tenggara; (3) munculnya pertimbangan-pertimbangan untuk membentuk FTA dari negara mitra ekonomi utamanya; (4) faktor strategis ASEAN dan peningkatan hubungan Cina dengan ASEAN yang berhasil mencapai kerjasama ASEAN-China *Free Trade Agreement* yang oleh Jepang dipandang sebagai langkah Cina untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Keempat konteks ini terkait erat dengan perubahan strategi perdagangan Jepang baik di level global maupun regional serta peran regional yang dijalankannya di kawasan, dalam hal ini, Asia Tenggara.

Secara umum, FTA dapat memberikan keuntungan ekonomi maupun keuntungan politik dan diplomasi. Secara ekonomi, FTA dapat menciptakan ekspansi pasar ekspor, peralihan struktur industri menjadi lebih efektif, dan perbaikan lingkungan bisnis agar menjadi lebih kompetitif. Selain itu, FTA membantu mengurangi friksi ekonomi menjadi isu politik dan membantu mengharmonisasikan regulasi dan sistem terkait perdagangan. Dari sisi politik dan diplomasi, FTA meningkatkan kekuatan tawar-menawar Jepang dalam negosiasi di WTO dan hasil dari negosiasi FTA dapat meningkatkan dan mempercepat negosiasi WTO. Pendalaman interdependensi ekonomi akan meningkatkan kepercayaan politik diantara negara-negara yang terlibat dalam FTA, melebarkan pengaruh dan kepentingan diplomasi global Jepang.

Dalam menjalankan strategi FTA-nya, Jepang berpatokan pada dua pertimbangan utama: kesesuaian FTA dengan kesepakatan WTO dan dampak FTA terhadap industri domestik. Terkait dengan WTO, ada tiga poin yang harus

ditegaskan. Pertama, kewajiban dan peraturan perdagangan tidak boleh lebih restriktif dari peraturan perdagangan sebelum dibentuknya FTA. Kedua, pembentukan FTA harus mencakup penghapusan kewajiban dan peraturan restriktif lainnya sesuai dengan prinsip *substantially all trade*. Ketiga, liberalisasi melalui FTA harus dicapai dalam waktu 10 tahun, paling sedikit dalam hal prinsip. Rujukan dari *substantially all trade* menunjukkan secara tidak langsung bahwa negara-negara harus mencapai standar liberalisasi yang sebanding dengan standar internasional dalam hal volume perdagangan.

Bagi Jepang, tujuan utama dari strategi FTA ini adalah meningkatkan struktur industrial Jepang. Namun demikian, beberapa isu liberalisasi dapat berefek sensitif secara politis. Oleh karena itu, Jepang hanya akan mengakomodasi isu-isu yang terkait langsung dengan reformasi ekonomi dan peningkatan daya saing Jepang secara keseluruhan.

Pergeseran Jepang ke strategi FTA dirancang untuk memenuhi strategi ekonomi regionalnya dalam beberapa cara. Pertama, FTA memungkinkan Jepang untuk terus mempromosikan liberalisasi ekonomi di Asia Timur yang konsisten dengan permintaan globalisasi dalam sebuah model yang dikontrol dan bertemu dengan permintaan ekonomi pembanguna Jepang maupun ASEAN. Melalui EPA, Jepang dapat lebih mengontrol arah dan jalan menuju liberalisasi ekonomi domestiknya daripada melalui kerangka multilateral yang mewajibkan timbal balik (prinsip *reciprocity*) yang lebih besar. Model kerjasama EPA sangat menguntungkan bagi Jepang karena ia memungkinkan Jepang untuk langkah proteksi untuk sektor ekonomi tertentu, sementara secara simultan menegosiasikan langkah-langkah liberalisasi tertentu yang memungkinkannya untuk menarget sektor spesifik yang dirasakannya memerlukan kompetisi yang lebih besar dan reformasi struktural.

Kedua, EPA bilateral juga memberi keuntungan dalam hal kontrol terhadap strategi pembangunan ASEAN dan tatanatan produksi di Asia Timur dan Tenggara. Negosiasi EPA selalu melibatkan langkah-langkah kerjasama yang lebih luas dari sekedar EPA. Dalam kerangka itu, paket-paket kerjasama sering ditopang oleh paket ODA untuk memilih sektor industri dan proyek integrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan Jepang tidak hanya liberalisasi

perdagangan tetapi memperkuat integrasi antara Jepang dengan ASEAN dalam cara yang sama dengan pada masa sebelum Krisis Asia 1997.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kepentingan Jepang dalam IJEPA sangat terkait dengan strategi mengamankan pasar Asia Timur dan penghausan biaya transaksi regional yang akan berkontribusi pada keamanan dan kepastian keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Jepang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan Jepang dan memperbaiki kapasitas kompetitifnya dalam konteks global.

Dalam konteks kerjasama EPA Jepang-Indonesia, EPA menjadi alat bagi Jepang untuk melengkapi proses liberalisasi perdagangan multilateral di WTO. FTA di Asia Timur juga memberikan kerangka legal untuk mengamankan integrasi de facto yang didorong oleh sektor bisnis. Dalam hal ini, pembentukan FTA Jepang-Cina adalah krusial sehingga secara global, kebijakan FTA Jepang bergeser dari "FTA defensif" menjadi "FTA Strategis" yang berusaha merangkul ASEAN ke dalam kerangka kerjasama yang lebih komprehensif. EPA juga mencerminkan konsistensi Jepang terhadap prinsip-prinsip WTO.

Dipilihnya Indonesia menjadi salah satu negara mitra EPA Jepang mengindikasikan masih pentingnya Indonesia di mata Jepang, terutama terkait dengan posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN. Tujuan utama Jepang adalah untuk menempa EPA regional dengan ASEAN. Akan tetapi, hambatan utama di sektor pertanian membuat Jepang menerapkan strategi *two-track approach* yakni negosiasi di tingkat regional dan bilateral demi mempermudah dan mempercepat proses pembentukan EPA dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, keuntungan dari pendekatan dua level adalah memberikan fleksibilitas bagi Jepang untuk menentukan lingkup dan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam kerangka EPA. Negosiasi yang dilakukan oleh Jepang menjadi sangat fleksibel karena dilakukan sesuai dengan karakter hubungannya dengan masing-masing negara. Dengan Indonesia misalnya, Jepang memiliki ketergantungan dalam hal impor LNG. Oleh karena itu, Jepang memanfaatkan IJEPA untuk "memaksa" Indonesia menjamin pasokan LNG ke Jepang sesuai kontrak perjanjian yang telah dibuat sebelum EPA.

IJEPA juga menjadi wujud interdependensi yang asimetris antara

Indonesia dengan Jepang. Kebijakan EPA Jepang memperlihatkan kesiapan dan agresivitas Jepang sehingga Indonesia harus lebih bersiap diri dalam menghadapi dinamika yang ada. Berkaca dari proses yang melatarbelakangi kebijakan EPA ini, Indonesia perlu memperhatikan situasi dan tren ekonomi global saat ini yang ditandai oleh derasnya globalisasi dan ekspansi ekonomi negara-negara besar serta kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru harus mendorong Indonesia untuk segera berbenah diri dan meningkatkan daya saingnya agar mampu menjawab tantangan eksternal. Peningkatan daya saing harus dilakukan di semua lini, mulai dari daya saing kapasitas produksi, kualitas produk, hingga perbaikan iklim investasi sehingga dapat lebih menarik investor Jepang untuk memperdalam dan memperluas aktivitas bisnisnya di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga perlu untuk memperhatikan dan mengawasi para tenaga kerja perawat dan *caregivers* yang dikirim ke Jepang. Dalam hal ini, Indonesia harus memastikan bahwa para tenaga kerja yang dikirim melalui skema EPA ini mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan dalam skema perjanjian EPA. Di masa depan, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja perawat ke Jepang merupakan awalan yang baik bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan pengiriman tenaga kerja terdidik dan profesional sebagai alternatif bagi pengiriman tenaga kerja yang tidak terdidik atau non-profesional. Upaya ini tentunya harus disertai dengan pengawasan ketat dari pemerintah Indonesia agar para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini tetap terlindungi hak-haknya.